

**PEMAKNAAN KHALAYAK TERHADAP KEBEBASAN PERS DALAM FILM *THE POST***

**Kaninda Bela Nagari, Hapsari Dwiningtyas Sulistyani**  
[kanindabela\\_nagari@yahoo.com](mailto:kanindabela_nagari@yahoo.com)

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
**Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407**  
**Faksimile (024) 7465405 Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

**ABSTRACT**

In watching film, the audience actively produces the meaning of the texts in the film. The audience's active interpretation of film texts makes the meanings diverse. This is because each audience has a different background, experience and daily life. The Post is a film featuring press freedom based on United States history. This film presents a picture of the media and newspaper reporters in carrying out their duties when faced with realities on the ground. Reporters are described as not always running smoothly when carrying out their journalistic duties, they are faced with challenges and obstacles both from within the media company and from outside. However, the meaning of the audience is not necessarily in accordance with the meaning offered by the media text in the film The Post. This study aims to describe the audience's meaning of press freedom in the film The Post. This study uses a qualitative-descriptive approach, and the Stuart Hall reception analysis method. The subjects of this research are journalists, press workers and media observers who have watched The Post film. The paradigm of this research is interpretive and the theory used is the Encoding-Decoding Model, Audience Meaning Theory and Four Theories of The Press. This study aims to describe the audience's meaning of press freedom in The Post film. This study uses a qualitative-descriptive approach, and the Stuart Hall reception analysis method. The subjects of this research are journalists, press workers and media observers who have watched The Post film. The paradigm of this research is interpretive and the theory used is Four Theories of The Press, Audience Meaning Theory, and Encoding-Decoding Model.

The results of this study succeeded selected sixteen preferred readings that featured press freedom in the text in The Post film. From the results of the research, it shows that the informants have different meanings. However, on the whole, informants have a tendency to interpret media texts in a negotiation. Informants interpret media texts in a negotiated position on the element of intervention freedom, there are it is natural that there is intervention in the political economy of the media because they think about the impact but if the impact of news is not greater than the interests of the community then there should be no prevention, the redaction does not have to ask the media owner's approval when publishing but in general the redaction ask the media owner's

approval, and it doesn't matter the redaction ask for the media owner's approval but the news must contain confirmation from the parties concerned. On element of publication freedom, there are the media are free to publish news but must include sources of information, the sources must be clear and competent, and still refers to journalistic principles and Journalistic Code of Ethics. On element of judicial independence, there is the publication of the Pentagon Papers news does not violate the Espionage Act so it should not be brought to justice. On element of public broadcasting institutions, there are when the news has a large impact then the media people must discuss first not immediately publish news and it doesn't matter the source is the same as other media but the most important thing is different on the presentation. On element of criminalization and intimidation of the press, there are accommodative media are loved and critical media are silenced, censorship is not in accordance with press freedom but the presentation of news must be balanced, news publications can violate the rule of law but from a journalistic perspective it does not violate the rule of law, the rule of law can indeed curb but writing remain accountable, the thought of journalists when writing but in writing remains according to journalistic principles, and news publications remain in accordance to Journalistic Code of Ethics. Informants interpret media texts based on the context and situation of a media as well as from their knowledge and everyday experiences.

**Keywords: Reception, Active Audience, The Post Film, Press Freedom**

## ABSTRAK

Dalam menonton film, khalayak secara aktif memproduksi makna teks-teks yang ada dalam film. Pemaknaan khalayak secara aktif terhadap teks-teks film membuat pemaknaan itu menjadi beragam. Hal ini dikarenakan masing-masing khalayak mempunyai latar belakang, pengalaman dan kehidupan sehari-hari yang berbeda. Film *The Post* adalah film yang menampilkan kebebasan pers berdasarkan sejarah Amerika Serikat. Film ini menampilkan gambaran media dan reporter surat kabar dalam melakukan tugasnya ketika dihadapkan pada realita di lapangan. Reporter digambarkan tidak selalu berjalan lancar ketika melakukan tugas jurnalistik, mereka dihadapkan pada tantangan dan hambatan baik dari dalam perusahaan media maupun dari luar. Namun, pemaknaan khalayak belum tentu sesuai dengan makna yang ditawarkan teks media dalam film *The Post*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemaknaan khalayak terhadap kebebasan pers dalam film *The Post*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, dan metode analisis resepsi Stuart Hall. Subjek penelitian ini adalah jurnalis, orang-orang pekerja pers dan pengamat media yang pernah menonton film *The Post*. Paradigma penelitian ini adalah interpretif dan teori yang digunakan adalah *Four Theories of The Press*, Teori Pemaknaan Khalayak, dan Model *Encoding-Decoding*.

Hasil penelitian ini berhasil memilih enam belas *preferred reading* yang menampilkan kebebasan pers dalam teks yang ada dalam film *The Post*. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa

informan memiliki pemaknaan yang cenderung beragam. Namun, dari keseluruhan, terdapat kecenderungan pada posisi negosiasi. Informan memaknai teks media secara negosiasi pada elemen kebebasan intervensi, seperti hal wajar ada intervensi kepentingan ekonomi politik media karena memikirkan dampaknya tetapi apabila dampak berita tidak lebih besar dari kepentingan masyarakat seharusnya tidak ada pencegahan, redaksi tidak harus meminta persetujuan pemilik media ketika publikasi tetapi pada umumnya redaksi meminta persetujuan pemilik media, dan redaksi meminta persetujuan pemilik media itu tidak masalah tetapi berita harus memuat konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Pada elemen kebebasan publikasi, seperti media bebas mempublikasikan berita tetapi narasumber harus jelas dan kompeten, mencantumkan sumber informasi, dan tetap mengacu pada prinsip jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik. Pada elemen independensi lembaga peradilan, seperti publikasi berita *Pentagon Papers* tidak melanggar Undang-Undang Spionase jadi tidak seharusnya dibawa ke pengadilan. Pada elemen lembaga penyiaran publik, seperti ketika berita dampaknya besar orang-orang media pasti berdiskusi dahulu tidak serta merta langsung publikasi berita dan tidak masalah narasumber sama dengan media lain yang terpenting penyajian berbeda. Pada elemen kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers, seperti media akomodatif dicintai dan media kritis dibungkam, penyensoran tidak sesuai kebebasan pers tetapi penyajian berita harus seimbang, publikasi berita dapat melanggar aturan hukum tetapi dari perspektif jurnalistik tidak melanggar aturan hukum, aturan hukum memang dapat mengekang tetapi tulisan tetap dapat dipertanggungjawabkan, bayangan wartawan ketika menulis tetapi dalam menulis tetap memperhatikan prinsip jurnalistik, dan publikasi berita tetap sesuai Kode Etik Jurnalistik. Informan memaknai teks media didasarkan pada konteks dan situasi dari suatu media serta dari pengetahuan dan pengalaman mereka sehari-hari.

**Kata Kunci: Pemaknaan, Khalayak Aktif, Film *The Post*, Kebebasan Pers**

## **PENDAHULUAN**

Film *The Post* merupakan sebuah film produksi Hollywood yang digarap oleh sutradara Steven Spielberg serta ditulis oleh Liz Hannah dan Josh Singer. Film ini menceritakan tentang kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis surat kabar Amerika Serikat, *The New York Times* dan *The Washington Post* pada tahun 1971 dalam mengungkap kebenaran yang disembunyikan oleh pemerintahan Amerika Serikat selama tiga dekade yaitu pengungkapan dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat terkait Perang Vietnam yang pada saat itu masih terjadi. Dokumen rahasia tersebut bernama *Pentagon Papers*. Dokumen tersebut berjumlah sekitar 4.000 halaman, berisi

tentang laporan dan hasil kajian Departemen Pertahanan Amerika Serikat terkait Perang Vietnam, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan bisa menang melawan Vietnam Utara. Namun, tetap saja Amerika Serikat mengirimkan tentara dan orang-orang sipil untuk berperang di Vietnam. Hasilnya, terdapat 600.000 orang yang tewas dan 300.000 lebih orang luka-luka, baik luka ringan maupun berat.

Tingkat urgensi sutradara Steven Spielberg membuat film *The Post* adalah karena iklim pemerintahan pada 2017 dan administrasi Donald Trump, dimana pada saat itu banyak tindakan memborbardir pers dan juga melabeli kebenaran sebagai hal yang palsu apabila tepat untuk mereka. Spielberg pada

saat itu membenci tagar “fakta alternatif”. Spielberg hanya percaya pada satu kebenaran yaitu kebenaran objektif. Fakta alternatif itu merupakan frasa yang diucapkan oleh Penasehat Presiden Amerika Serikat, Kellyanne Conway pada wawancara Meet The Press, dimana frasa itu digunakan untuk membela pernyataan palsu Sekretaris Pers Gedung Putih, Sean Spicer tentang jumlah penonton pelantikan Donald Trump. Fakta alternatif itu dianggap oleh para jurnalis dan reporter sebagai kebohongan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada. (<https://www.theguardian.com/film/2018/jan/19/steven-spielberg-the-urgency-to-make-the-post-was-because-of-this-administration>)

Selanjutnya, Spielberg berkata bahwa cerita dari *The Post* sangat relevan dengan waktu diangkatnya film tersebut. Dia menambahkan bahwa menariknya terkadang lensa adalah cara terbaik untuk mencerminkan sejarah dan membandingkan sejarah dari satu cermin ke cermin berikutnya. Film *The Post* menurutnya terlalu tepat waktu untuk tidak dibuka secepat mungkin pada masa kepemimpinan Donald Trump. Dengan film *The Post*, Spielberg berharap orang-orang menyadari bahwa jurnalis, reporter investigasi, penerbit, dan editor adalah pencerita kebenaran dan karena itu mereka adalah pahlawan. Melalui film tersebut, Spielberg ingin menyampaikan Ben Bradlee dan Katharine Graham adalah patriot Amerika karena mengutamakan negara dan kebenaran yang pertama pada resiko pribadi dan profesional yang hebat. Mungkin orang-orang percaya tidak ada perbedaan antara keyakinan dan fakta. Namun, dengan melihat Ben Bradlee, Katharine Graham, *The Washington Post* dan *The New York Times* mengingatkan kepada orang-orang bahwa fakta itu adalah dasar dari kebenaran. (<https://www.screendaily.com/features/how-spielberg-turned-around-the-post-in-less-than-10-months/5126310.article>)

Film ini memperlihatkan surat kabar Amerika Serikat *The New York Times* yang menginisiasi menerbitkan dokumen rahasia *Pentagon Papers* dari informan Daniel Ellsberg, salah satu yang melakukan kajian terkait Perang Vietnam. Pembredelan pers sementara surat kabar *The New York Times* pun terjadi karena melanggar Undang-Undang Spionase Amerika Serikat Tahun 1917. Selang beberapa hari, *The Washington Post* hendak menerbitkan dokumen rahasia *Pentagon Papers* juga. Perdebatan internal antara petinggi surat kabar *The Washington Post* terjadi. Penerbit sekaligus pemilik *The Washington Post* dilema, dia berpikir di satu sisi dokumen harus diterbitkan, namun di sisi lain apabila surat kabar dibredel, dia memikirkan kelangsungan nasib karyawan, reputasi surat kabar dan dirinya, serta potensi nilai saham yang akan turun. *The Washington Post* akhirnya menerbitkan dan dinilai melanggar Undang-Undang Spionase Amerika Serikat Tahun 1917 dan ditindak di pengadilan. Banyak surat kabar lain ikut menerbitkan dokumen Perang Vietnam. Surat kabar yang menerbitkan dokumen itu kemudian ditindak di Mahkamah Agung. Putusan final Mahkamah Agung menyatakan tidak membredel surat kabar-surat kabar tersebut karena para hakim memberikan dukungan atas kebebasan pers di Amerika Serikat.

Film *The Post* dianggap sebagai film politik terbaik. Dalam ajang *National Board of Review Award 2018*, film ini berhasil memenangkan penghargaan dengan kategori Aktris Terbaik (Meryl Streep), Aktor Terbaik (Tom Hanks), dan Film Terbaik. (<https://seleb.tempo.co/read/1049290/the-post-menang-aktor-dan-aktris-terbaik-national-board-of-review/full&view=ok>)

Selain dalam ajang *National Board of Review Award 2018*, film *The Post* juga memenangkan penghargaan WGAW atau *Writers Guild of America West* yang

dinobatkan pada Liz Hannah dan Josh Singer selaku penulis film *The Post* pada ajang penghargaan *Paul Selvin Award 2018*. (<https://deadline.com/2018/01/liz-hannah-josh-singer-wga-west-paul-selvin-award-the-post-1202245488/>)

Film *The Post* juga berhasil masuk nominasi pada ajang bergengsi, Oscar 2018 dengan kategori Aktris Pemeran Utama Terbaik (Meryl Streep) dan Film Terbaik. (<http://www.harnas.co/2018/02/16/peran-jurnalistik-dan-kebebasan-pers>).

Film menjadi media penyalur pesan audio visual yang dibawa oleh penulis dan sutradara. Film juga merupakan gambaran dari realitas kehidupan masyarakat. Melalui film, pesan-pesan kebebasan pers digambarkan dalam sebuah cerita. Film *The Post* menceritakan lika-liku para jurnalis ketika mempraktekkan jurnalisisme. Film ini menuturkan bahwa pers dapat menjalankan fungsi sarana kritik dan kontrol terhadap pemerintah. Film ini memberikan gambaran kepada jurnalis-jurnalis di Indonesia dalam mengungkapkan kebenaran sekaligus memberikan kontrol kepada pemerintah. Pers sebagai peran penting dalam menegakkan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan hak asasi warga negara. Kebebasan pers tidak akan tercapai apabila tidak ada yang berjuang untuk menegakkannya dan kebebasan berjalan beriringan dengan kebenaran. Oleh karena itu, dalam praktek menegakkan kebebasan pers, jurnalis mempunyai peran penting dalam kebebasan pers, sehingga perlu menanamkan bahwa kebebasan pers harus terus dikawal baik dalam lingkup politik, ekonomi maupun hukum.

Tanda-tanda seperti teks dan adegan dalam film *The Post* memiliki potensi pemaknaan yang berbeda dengan budaya yang ada di Indonesia. Sehingga, tanda-tanda tersebut akan dimaknai berbeda oleh khalayak film. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis resepsi Stuart Hall. Alasan analisis

resepsi cocok digunakan untuk menganalisis film *The Post* karena khalayak secara aktif melakukan pemaknaan terhadap teks dan adegan dalam film. Dalam menonton film, khalayak memproduksi dan menghasilkan makna serta persepsi itu muncul sebagai hasil dari interpretasi data-data sensoris. Makna sendiri pada dasarnya terdapat dua macam, yaitu denotatif dan konotatif. Makna denotatif merupakan makna yang diekspresikan secara langsung oleh khalayak. Setelah itu, makna yang muncul ketika khalayak dihadapkan dengan tanda-tanda sesuai lingkungan sosial khalayak berada dinamakan makna konotatif. Sehingga, pesan-pesan yang disampaikan dalam film akan dimaknai berbeda-beda oleh khalayak yang berbeda-beda berdasarkan kemampuan kognitif serta afektif mereka. Selain kemampuan kognitif dan afektif, pemaknaan khalayak dalam menonton film dipengaruhi juga oleh latar belakang budaya, kehidupan dan pengalaman mereka sehari-hari. Oleh karena itu, perlu untuk melihat keberagaman pemaknaan terkait kebebasan pers dalam film oleh khalayak. Maka, penelitian ini akan mendalami bagaimana khalayak memaknai kebebasan pers yang ditampilkan dalam film ini.

## **RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana pemaknaan khalayak terhadap kebebasan pers dalam film *The Post*?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemaknaan khalayak terhadap kebebasan pers dalam film *The Post*.

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**

### **Film dan Representasi Kebebasan Pers**

Film dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 merupakan:

“Karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.”

Representasi merupakan hal yang menjadi wakil atau perwujudan (E, A, 2017:404). Kebebasan pers dalam suatu negara adalah pers yang jelas bebas dan media berita mampu berfungsi sebagai arena persaingan politik. Selain itu, kebebasan pers juga didefinisikan sebagai pers dikompromikan oleh korupsi atau pengaruh tidak resmi, tetapi media berita masih mampu berfungsi sebagai arena persaingan politik (Van Belle, 1997:408).

Indikator indeks kebebasan pers menurut Dewan Pers (2020:2) terdiri dari kondisi lingkungan ekonomi, fisik dan politik serta hukum. Berdasarkan kondisi lingkungan fisik dan politik diantaranya kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan intervensi, kebebasan wartawan dari kekerasan, kebebasan media alternatif, keragaman pandangan dalam media, informasi akurat dan berimbang, akses atas informasi publik, pendidikan insan pers, dan kesetaraan akses bagi kelompok rentan. Berdasarkan kondisi lingkungan ekonomi diantaranya kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, independensi dari kelompok kepentingan yang kuat, keragaman kepemilikan, tata kelola perusahaan yang baik, dan lembaga penyiaran publik. Sedangkan, berdasarkan kondisi lingkungan hukum diantaranya independensi dan kepastian hukum lembaga peradilan, kebebasan mempraktekkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi pers, etika pers, mekanisme pemulihan, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

### **Teori Pers dan Kebebasan Pers Amerika Serikat-Indonesia**

*Four theories of the press* atau teori pers mendeskripsikan dunia menjadi dua, yaitu

yang tertindas diperintah oleh rezim otoriter atau komunis dan yang bebas ditingkatkan oleh demokrasi liberal. Keempat teori itu antara lain:

#### 1. Teori Otoritarian

Siebert mengungkapkan bahwa teori ini adalah sebuah sistem dimana pers, sebagai sebuah institusi, dikontrol dalam fungsi dan operasinya oleh masyarakat yang terorganisir melalui institusi lain, yaitu pemerintah (Vaca, 2017:12). Gunther melanjutkan ini adalah bagaimana aturan-aturan otoritarian mengontrol struktur sosial, politik dan ekonomi melalui berbagai cara, termasuk media. Di bawah otoritarian, elit politik yang tidak bertanggung jawab dan tidak dibatasi menggunakan media massa untuk mengejar tujuan politik mereka sendiri. Ini adalah kekuatan negara atau pemerintah yang tidak terbantahkan yang memastikan dominasinya atas komunikasi publik dengan mengatur dan menyebarkan informasi yang sangat selektif melalui 'media boneka' (Vaca, 2017:13).

#### 2. Teori Komunis Soviet

Teori ini adalah pengembangan dari teori Otoritarian. Siebert menuturkan terdapat dua perbedaan antara teori Komunis Soviet dengan teori Otoritarian. Pertama, kekuatan komunikatif media mewakili bagian sentral dari berfungsinya rezim secara memadai. Rezim memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberi informasi dan membimbing masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama. Tujuan dan proses komunikasi serta pesan ditentukan oleh partai Komunis daripada dihasilkan dalam ruang publik. Kedua, aturan Komunis memiliki monopoli lengkap sebagai penerbit, pemegang saham, perancang, direktur dan distributor komunikasi massa. Pada sistem ini, partai Komunis, atas nama warga negara, memiliki, mengoperasikan, berinvestasi dan secara langsung mendistribusikan komunikasi massa sesuai dengan tujuan dan proses yang

tertanam pada revolusi dunia (Vaca, 2017:13).

### 3. Teori Libertarian

Siebert mengungkapkan sistem Libertarian sebagai produk pencerahan, media dipahami sebagai mitra dalam mencari kebenaran: tujuan utamanya adalah untuk berfungsi sebagai kontrol dan keseimbangan kekuatan politik. Karena itu kebebasan dari pemerintah sangat penting, serta akses gratis ke ide dan informasi. Fungsi tambahan media di masyarakat adalah untuk memberi informasi, menghibur dan menjual (Vaca, 2017:16).

Ekonomi yang sehat dan mandiri menjadi penting dalam sistem ini untuk dapat mendukung media sebagai industri informasi dan hiburan. Iklan dan pendapatan komersial lainnya menjadi sumber utama dukungan ekonomi yang memastikan media berfungsi dengan baik dan bebas dari pengaruh pemerintah atau bahkan dominasi. Fungsi utama rezim politik di bawah model ini adalah untuk memberikan dasar bagi ekonomi yang stabil dan kerangka kerja hukum yang kuat yang melindungi dan mempromosikan pengembangan media yang bebas sebagai entitas komersial (Vaca, 2017:14).

### 4. Teori Tanggung Jawab Sosial

Teori ini dikembangkan dari teori libertarian. Siebert (dalam Vaca, 2017:16) menuturkan bahwa teori Tanggung Jawab Sosial sebagai tanggapan terhadap tuntutan yang diberlakukan atas media massa dalam hal tanggung jawab, persaingan, keragaman, akses ke informasi dan representasi penggemar.

Media memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan hak atas informasi dimana media harus akurat; media tidak boleh berbohong dan harus mengidentifikasi fakta sebagai fakta serta media harus mengidentifikasi opini sebagai opini (Peterson dalam Vaca, 2017:14). Vaca (2017:14) menambahkan

negara dalam hal ini tidak boleh hanya membiarkan kebebasan; namun juga harus aktif mempromosikan kebebasan itu, seperti memberlakukan undang-undang untuk melarang penyalahgunaan media terhadap pers atau memasuki bidang komunikasi untuk melengkapi media yang ada. Dalam sistem media yang bertanggung jawab sosial, negara harus melakukan intervensi dengan hati-hati dalam memfungsikan media untuk memastikan bahwa media memenuhi tugas-tugas mereka. Intervensi negara terhadap media mungkin ada, namun tidak seberat dan seketat seperti di bawah rezim Otoriter atau Komunis dan akan dibatasi untuk melindungi kebebasan berekspresi bahkan dari media sendiri sebagai landasan kebebasan politik.

Pada 1900-an ketika Republik memimpin, media Amerika Serikat menjadi partisan, tidak bisa seimbang dan bersikap netral. Namun, ketika Teori Pers dikukuhkan sebagai pilar keempat kekuasaan, maka pers partisan banyak yang mulai terdistorsi. Kemudian, muncul istilah *muckraking journalism* (jurnalisme investigasi) yang memiliki arti bahwa jurnalis tidak boleh memasukkan opini pribadi dan tendesinya ke pemberitaan. Dalam artikel ini, Thomas E. Patterson menyatakan bahwa Amerika Serikat merupakan negara dengan sistem pers paling bebas dan juga pers disana menerapkan paham komersial dan adversarial. Maka, tendensi media di Amerika Serikat dianalisis oleh Patterson berada dalam ranah *game centered coverage* dan *negativity*. Dalam hal ini, sistem pers di Amerika Serikat adalah penganut *The Freest*, dimana tidak ada hambatan dan penghalang bagi pers Amerika Serikat. Sesuai dengan Amandemen Pertama Amerika Serikat, terlihat bahwa tidak ada aturan yang mengatur tentang pemberitaan dan pers. *The Game* yang dimaksud Patterson merujuk pada efek komersialisasi konten media. Pemainnya saling berkompetisi dan menyerang satu sama lain demi mendapatkan

tujuannya. Sedangkan *Negativity* adalah pemberitaan negatif dengan prinsip skeptis. (<https://muftipages.wordpress.com/2010/08/17/the-freest-a-la-amerika-serikat/>)

Di Indonesia, kebebasan pers tergantung pada penguasa politik yang berkuasa saat itu. Apabila penguasa pada saat itu semakin otoriter maka kebijakan persnya juga semakin konservatif. Begitu pula sebaliknya, semakin penguasa demokratis maka kebijakan persnya juga semakin otonom (Daulay, 2016:31). Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 lahir saat zaman reformasi. Selain itu, aturan-aturan untuk wartawan dan media juga lahir saat zaman reformasi. Kode Etik Jurnalistik yang sudah ada, direvisi pada 1999 dengan tujuh poin. Pada tahun 2006, Dewan Pers merumuskan Kode Etik Jurnalistik yang baru dan terdapat sebelas poin. Hal ini karena tujuh poin yang sebelumnya masih kurang (Daulay, 2016:32-33).

### **Teori Pemaknaan Khalayak**

Khalayak memiliki kebebasan yang relatif dalam menafsirkan makna dalam teks media yang ditawarkan kepada mereka, sehingga mengakibatkan timbulnya banyak makna potensial. Stuart Hall menjelaskan tiga cara dasar dimana khalayak dapat mengaktualisasikan makna yang disukai. Di tengah-tengah polisemi tekstual, Hall menyarankan satu makna yang memiliki posisi istimewa. Media massa umumnya memiliki kaitan kuat dalam tatanan kapitalis, oleh karena itu secara logika akan melayani kepentingan hegemoni kelas penguasa, maka makna yang disukai adalah makna yang sesuai dengan kepentingan ideologi ini (Littlejohn dan Karen, 2009:66). Tiga posisi itu antara lain:

1. Posisi Dominan (*Dominant Reading/Position*)

Posisi dimana khalayak mengikuti pembacaan yang dominan atau setuju

dengan makna yang ada dalam film. Tidak ada perbedaan pemaknaan antara produsen dan khalayak film.

2. Posisi Oposisional (*Oppositional Reading/Position*)

Posisi dimana khalayak melawan atau tidak setuju dengan makna yang ada dalam film. Khalayak memiliki pandangan sendiri dalam hal pemaknaan.

3. Posisi Negosiasi (*Negotiated Reading/Position*)

Posisi dimana khalayak berada di tengah-tengah posisi dominan dan oposisional, khalayak setuju dengan makna yang ada dalam teks media namun menegosiasikan makna tersebut. Khalayak menegosiasikan makna sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa dirinya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif-deskriptif dengan paradigma interpretif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis resepsi Stuart Hall. Subjek penelitian adalah jurnalis, orang-orang pekerja pers dan pengamat media yang pernah menonton film *The Post*. Dalam menganalisa film, peneliti menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Sumber data didapatkan langsung dari wawancara mendalam dengan informan. Sumber data lainnya berasal dari buku, jurnal, artikel dan data dari internet yang berkaitan dengan tema penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari analisis semiotika Roland Barthes dengan makna denotasi, makna konotasi dan mitos didapatkan *preferred reading* terkait kebebasan pers yang disajikan dalam film *The Post*. Kebebasan pers yang ditampilkan adalah boleh dan normal adanya intervensi pemilik media untuk mengganti reporter yang kritis, boleh dan normal adanya intervensi ekonomi politik media dalam

pemberitaan, redaksi harus meminta persetujuan pemilik media, surat kabar bebas mempublikasikan berita pernikahan putri Presiden, surat kabar bebas mempublikasikan berita dokumen rahasia pemerintah, reporter dan fotografer seharusnya bebas mengakses informasi publik, pemerintah boleh menuntut surat kabar ke Pengadilan, Hakim bersikap independen dalam menyelesaikan kasus surat kabar, surat kabar bebas membuat berita sesuai kepentingan publik, surat kabar seharusnya bebas dari sensor dan aturan hukum yang menghambat pers.

Hasil wawancara mendalam dengan informan menunjukkan bahwa informan memaknai teks media secara beragam, namun informan memiliki kecenderungan pada posisi negosiasi. Informan setuju dengan makna yang ditawarkan film, namun mereka menegosiasikan makna tersebut disesuaikan dengan kondisi suatu media dan nilai-nilai yang mereka bawa serta pengalaman mereka sehari-hari.

Hasil yang didapatkan dari penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemaknaan informan pada elemen kebebasan intervensi yaitu intervensi pemilik media mengganti reporter cenderung pada posisi oposisional.

Pemaknaan informan dalam adegan Kay menekan Ben Bradlee untuk mengganti reporter *The Washington Post* di Gedung Putih memiliki kecenderungan pada posisi oposisional. Terdapat tiga informan yang memaknai secara oposisional dan satu informan memaknai secara dominan. Hal ini menandakan sebagian besar informan tidak setuju dengan makna dominan yang ditawarkan dalam film dan informan memiliki pemaknaannya sendiri. Makna oposisional dari ketiga informan tersebut adalah intervensi pemilik media tidak sesuai dengan prinsip kebebasan pers; intervensi pemilik media tidak mencerminkan kebebasan pers; serta wartawan harus

independen, akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.

Makna dominan yang muncul dari satu informan tersebut adalah intervensi yang dilakukan pemilik media ke redaksi itu boleh-boleh saja.

2. Pemaknaan informan pada elemen kebebasan intervensi yaitu intervensi ekonomi politik media terhadap pemberitaan cenderung beragam.

Terdapat keberagaman pemaknaan dalam adegan Penasehat Hukum dan Dewan Direksi *The Washington Post* mencegah publikasi *Pentagon Papers*. Dua informan memaknai secara oposisional, satu informan memaknai secara dominan dan satu informan memaknai secara negosiasi. Makna oposisional dari kedua informan tersebut adalah pencegahan publikasi yang terjadi tidak sesuai prinsip kebebasan pers dan pencegahan publikasi merupakan bentuk pengekanan kebebasan pers. Makna dominan dari satu informan tersebut adalah intervensi bisnis media terhadap pemberitaan itu boleh dan wajar. Makna negosiasi dari satu informan adalah intervensi ekonomi politik media terhadap pemberitaan adalah hal wajar, tetapi apabila dampak berita tidak lebih besar dari kepentingan masyarakat seharusnya tidak ada pencegahan publikasi.

3. Pemaknaan informan pada elemen kebebasan intervensi yaitu redaksi harus meminta persetujuan pemilik media cenderung beragam.

Terdapat keberagaman pemaknaan dalam adegan Kay menyetujui publikasi *Pentagon Papers* di telepon, pemaknaan informan beragam. Dua informan memaknai secara negosiasi, satu informan memaknai secara dominan dan satu informan memaknai secara oposisional. Makna negosiasi dari kedua informan adalah redaksi tidak harus meminta persetujuan pemilik media, tetapi pada umumnya meminta persetujuan pemilik

media serta persetujuan pemilik media itu tidak masalah, tetapi tetap dilengkapi dengan konfirmasi atau pernyataan pihak-pihak terkait. Makna dominan yang muncul dari satu informan tersebut adalah penerbitan berita harus sesuai atau mendapat izin dari pemilik media. Makna oposisional dari satu informan adalah redaksi tidak meminta persetujuan pemilik media.

4. Pemaknaan informan pada elemen kebebasan intervensi yaitu redaksi harus meminta persetujuan pemilik media cenderung beragam.

Terdapat keberagaman pemaknaan dalam adegan reporter menyiapkan publikasi setelah menelepon Kay. Dua informan memaknai secara dominan, satu informan memaknai secara negosiasi dan satu informan memaknai secara oposisional. Makna dominan yang muncul dari kedua informan adalah redaksi sudah pasti meminta persetujuan dari pemilik media serta penerbitan berita harus sesuai atau mendapat izin dari pemilik media. Makna negosiasi dari satu informan adalah meminta persetujuan pemilik media adalah hal lumrah bukan keharusan, tetapi umumnya meminta persetujuan pemilik media. Makna oposisional dari satu informan adalah redaksi tidak harus meminta persetujuan pemilik media.

5. Pemaknaan informan pada elemen kebebasan publikasi yaitu media bebas publikasi berita pernikahan cenderung pada posisi negosiasi.

Pemaknaan dalam adegan Ben menekankan hak publikasi pada rapat editorial, pemaknaan informan cenderung pada posisi negosiasi. Terdapat tiga informan memaknai secara negosiasi dan satu informan memaknai secara dominan. Makna negosiasi dari ketiga informan adalah media bebas mempublikasikan berita pernikahan, tetapi tetap menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik; media bebas mempublikasikan berita

pernikahan, tetapi tetap sesuai Kode Etik Jurnalistik; serta setuju dengan hak publikasi yang dikatakan Ben, tetapi narasumber harus jelas dan kompeten. Makna dominan dari satu informan tersebut adalah publikasi informasi pernikahan putri Presiden sesuai dengan kebebasan pers dan merupakan informasi yang seharusnya dapat diakses publik.

6. Pemaknaan informan pada elemen kebebasan publikasi yaitu media bebas publikasi berita dokumen rahasia cenderung beragam.

Terdapat kecenderungan pemaknaan yang beragam dalam adegan *The New York Times* menerbitkan *Pentagon Papers*. Dua informan memaknai secara dominan dan dua informan memaknai secara negosiasi. Makna dominan yang muncul dari kedua informan adalah publikasi berita *Pentagon Papers* sesuai dengan kebebasan pers dan tidak dilarang. Makna negosiasi dari kedua informan adalah media bebas mempublikasikan berita, tetapi tetap menaati kode etik seperti menyajikan berita seimbang dan akurat; serta publikasi berita *Pentagon Papers* tidak masalah, yang terpenting berita ditulis sesuai dengan fakta.

7. Pemaknaan informan pada elemen kebebasan publikasi yaitu media bebas publikasi berita dokumen rahasia cenderung beragam.

Terdapat kecenderungan pemaknaan yang beragam dalam adegan Ben menekankan hak publikasi pada Kay di telepon. Dua informan memaknai negosiasi, satu informan memaknai dominan dan satu informan memaknai oposisional. Makna negosiasi dari kedua informan adalah media bebas mempublikasikan berita, tetapi tetap menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik; dan media bebas mempublikasikan berita, tetapi tetap sesuai Kode Etik Jurnalistik. Makna dominan yang muncul dari satu informan adalah penekanan hak publik perlu dilakukan, itu hak publik untuk tahu. Makna

oposisional dari satu informan adalah media tidak bebas mempublikasikan berita.

8. Pemaknaan informan pada elemen kebebasan publikasi yaitu media bebas publikasi berita dokumen rahasia cenderung beragam.

Pemaknaan informan dalam adegan surat kabar lain ikut mempublikasikan *Pentagon Papers* cenderung beragam, terdapat dua informan memaknai dominan dan dua informan memaknai negosiasi. Makna dominan dari kedua informan adalah publikasi berita dokumen rahasia itu hal wajar dan tidak dilarang. Makna negosiasi dari kedua informan adalah media bebas publikasi berita, tetapi tidak bebas sebebaskan-tetap ada kontrol serta publikasi berita itu tidak masalah yang terpenting berita tidak plagiat dan harus mencantumkan narasumbernya.

9. Pemaknaan informan pada elemen kebebasan mengakses informasi publik yaitu penutupan akses reporter dan fotografer cenderung pada posisi dominan.

Keempat informan memaknai adegan Presiden Nixon mengarahkan stafnya untuk menutup akses reporter dan fotografer secara dominan. Hal ini menandakan seluruh informan setuju dengan makna dominan yang ditawarkan dalam film. Makna dominan dari keempat informan adalah penutupan akses reporter dan fotografer itu tidak boleh dan kebebasan pers dipertanyakan, penutupan akses reporter dan fotografer itu tidak sesuai kebebasan pers, serta penutupan akses reporter dan fotografer merupakan bentuk pengekangan kebebasan pers.

10. Pemaknaan informan pada elemen independensi lembaga peradilan yaitu pemerintah boleh menuntut media ke Pengadilan cenderung beragam.

Pemaknaan informan dalam adegan *The New York Times* mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan cenderung beragam, terdapat dua

informan memaknai dominan dan dua informan memaknai oposisional. Makna dominan yang muncul dari kedua informan adalah pemerintah itu tidak masalah. Makna oposisional dari kedua informan adalah penuntutan pemerintah merupakan intervensi pemerintah terhadap media dan penuntutan pemerintah merupakan bentuk penekanan atau pengancaman pemerintah.

11. Pemaknaan informan pada elemen independensi lembaga peradilan yaitu hakim distrik independen cenderung beragam.

Pemaknaan informan dalam adegan *The Washington Post* sidang di pengadilan setelah adanya pemberitaan perbedaan hukuman antara *The New York Times* dan *The Washington Post* cenderung beragam, terdapat dua informan memaknai negosiasi dan dua informan memaknai oposisional. Makna negosiasi yang muncul dari kedua informan adalah publikasi *Pentagon Papers* tidak melanggar Undang-Undang Spionase, sehingga tidak seharusnya dibawa ke Pengadilan. Makna oposisional dari kedua informan adalah lembaga peradilan tidak objektif dan penegak hukum pilih kasih.

12. Pemaknaan informan pada elemen independensi lembaga peradilan yaitu hakim Mahkamah Agung independen cenderung beragam.

Pemaknaan informan dalam adegan Mahkamah Agung memberitahukan kemenangan surat kabar cenderung beragam, terdapat dua informan memaknai dominan dan dua informan memaknai negosiasi. Makna dominan dari kedua informan adalah penegak hukum bersikap objektif dan penegak hukum profesional. Makna negosiasi dari kedua informan adalah tindakan hakim sesuai prinsip kebebasan pers dan media tidak melanggar Undang-Undang Spionase serta tindakan hakim sesuai prinsip kebebasan pers dan media tidak melanggar hukum.

13. Pemaknaan informan pada elemen lembaga penyiaran publik yaitu media bebas membuat berita sesuai kepentingan publik cenderung pada posisi negosiasi.

Pemaknaan informan dalam adegan Kay, Ben, Penasehat Hukum dan Dewan Direksi berdiskusi di rumah Kay, setelah tahu ada kemungkinan narasumber sama dengan *The New York Times* didominasi posisi negosiasi, terdapat tiga informan memaknai negosiasi dan satu informan memaknai dominan. Makna negosiasi dari ketiga informan adalah Kay meminta berbagai pandangan terhadap berita yang potensi dampaknya besar, pihak-pihak terkait pasti diskusi dahulu dan tidak masalah narasumber sama dengan media lain yang terpenting penyajian berbeda. Makna dominan yang muncul dari satu informan adalah berita *Pentagon Papers* penting untuk diterbitkan itu menyangkut masyarakat.

14. Pemaknaan informan pada elemen kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers yaitu media seharusnya bebas hukuman sensor cenderung beragam.

Pemaknaan informan dalam adegan *The New York Times* disensor oleh Pengadilan cenderung beragam, terdapat dua informan memaknai negosiasi dan dua informan memaknai dominan. Makna negosiasi dari kedua informan adalah media yang akomodatif dicintai dan media yang kritis dibungkam serta sensor tidak sesuai kebebasan pers, tetapi media dengan catatan menyajikan berita secara berimbang. Makna dominan kedua informan adalah penyensoran tidak sesuai kebebasan pers seharusnya media bebas dari hukuman sensor serta tidak setuju dengan penyensoran sebaiknya media tidak disensor.

15. Pemaknaan informan pada elemen kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers yaitu media seharusnya bebas aturan hukum cenderung beragam.

Terdapat keberagaman pemaknaan informan dalam adegan Penasehat Hukum memberitahu Ben Bradlee publikasi *Pentagon Papers* dapat melanggar Undang-Undang Spionase. Pemaknaan informan cenderung beragam, terdapat dua informan memaknai negosiasi, satu informan memaknai dominan dan satu informan memaknai oposisional. Makna negosiasi dari kedua informan adalah publikasi berita dapat melanggar aturan hukum, tetapi dari perspektif jurnalistik publikasi berita tidak melanggar aturan hukum dan aturan hukum memang dapat mengekang kebebasan pers, tetapi tulisan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Makna dominan dari satu informan adalah publikasi dapat melanggar aturan hukum. Makna oposisional dari satu informan adalah dari perspektif jurnalistik, publikasi berita tidak melanggar hukum.

16. Pemaknaan informan pada elemen kriminalisasi dan intimidasi terhadap pers yaitu media seharusnya bebas hukuman sensor didominasi pada posisi negosiasi.

Pemaknaan informan dalam adegan Ben Bradlee memberitahu Kay bahwa mereka dapat dipenjara cenderung pada posisi negosiasi, terdapat tiga informan memaknai negosiasi dan satu informan memaknai dominan. Makna negosiasi dari ketiga informan adalah penulisan berita tetap sesuai Kode Etik Jurnalistik; publikasi dapat melanggar aturan hukum, tetapi dari perspektif jurnalistik, publikasi berita tidak melanggar hukum; serta bayangan wartawan ketika menulis tetapi dalam menulis tetap memperhatikan prinsip jurnalistik. Makna dominan yang muncul adalah publikasi berita dengan narasumber sama dapat melanggar aturan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku & Jurnal

Daulay, H. (2016). *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. PT Remaja Rosdakarya.

Dewan Pers. (2020). *Buku Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2020* (2nd ed.). PT SUCOFINDO.

E, A., D. (2017). *Kamus Bahasa Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Encyclopedia of Communication Theory*. SAGE Publications, Inc.

Vaca-Baqueiro, M. T. (2017). *Four Theories of the Press: 60 Years and Counting*. Taylor & Francis Ltd.

Van Belle, D. A. (1997). Press freedom and the democratic peace. *Journal of Peace Research*, 34(4), 405-414. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/424862>

### **Laman Internet**

Antara. (2018, January 11). The post menang aktor dan aktris terbaik national board of review. *Tempo.co*. <https://seleb.tempo.co/read/1049290/the-post-menang-aktor-dan-aktris-terbaik-national-board-of-review/full&view=ok>

Freedland, J. (2018, January 19). Steven spielberg: 'the urgency to make the post was because of trump's administration'. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/film/2018/jan/19/steven-spielberg-the-urgency-to-make-the-post-was-because-of-this-administration>

Latifah, M. N. (2010, August 17). *The freest a la Amerika Serikat*. <https://muftipages.wordpress.com/2010/08/17/the-freest-a-la-amerika-serikat/>

Kay, J. (2018, February 7). How spielberg turned around 'the post' in less than 10 months. *Screendaily*. <https://www.screendaily.com/features/how-spielberg-turned-around-the-post-in-less-than-10-months/5126310.article>

Petski, D. (2018, January 18). Liz hannah & josh singer to receive wga west's paul selvin award for 'the post'. *Deadline*. <https://deadline.com/2018/01/liz-hannah-josh-singer-wga-west-paul-selvin-award-the-post-1202245488/>

### **Risalah Undang-Undang**

UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman